KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN

GINSI

JATENG

Edisi April 2025 : 983 TAHUN KE - LIII

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WA : 082133919046
Email : ginsi.jateng@gmail.com // Website : www.ginsijateng.com

Respons Ginsi Soal Rencana Relaksasi Impor

BULETIN GINSI JATENG

APRIL 2025

NOMOR : 983 TAHUN KE - LIII

DAFTAR ISI

- Liputan Khusus : Respons Ginsi Soal Rencana Relaksasi Impor 1
- Impor Indonesia Naik di Maret 2025, Paling Banyak Sayur dan Buah-buahan 4
- Ekspor Indonesia Pada Triwulan I Tahun 2025 Sebesar 66,62 Miliar Dolar AS 5
- Hati-hati, Sembilan Pangan Olahan Impor Ini Mengandung Unsur Babi 7
- Perluas Peluang Ekspor, Bea Cukai Beri Izin Kawasan Berikat ke Produsen Tas di Jepara 8
- BPS Catat Nilai Ekspor Jateng Per Maret Tembus 1.010,70 Juta Dolar AS 9
- Regulasi Impor Harus Dijalankan Selektif, Jangan Lemahkan Industri Dalam Negeri 11
- RI Masih Impor Batu Nisan dari China, Tahun Lalu Nilainya Melonjak Segini 12
- Trump Umumkan Tarif Impor Otomotif 25%, Berlaku Mulai 2 April 2025 13
- Kurangi Impor, Pemerintah Targetkan 2 Fasilitas LPG Baru Beroperasi pada Akhir 2025 16
- Peraturan Pemerintah : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik 17
- Kegiatan BPD Ginsi Jateng Periode April 2025 20

**** dihimpun dari berbagai sumber*

LIPUTAN KHUSUS :

RESPONS GINSI SOAL RENCANA RELAKSASI IMPOR

Pemerintah Indonesia berencana membuka keran impor selebar-lebarnya untuk berbagai komoditas. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar kuota impor dihapus dan tidak ada persetujuan teknis (pertek) yang selama ini menghambat gerak importir.

Merespons hal itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengatakan, Pemerintah perlu lebih berhati-hati dan melalui perhitungan yang matang dan komprehensif terhadap rencana kebijakannya tersebut, lantaran berpotensi membanjirnya produk impor dan melemahkan industri/produk dalam negeri karena semakin tak mampu bersaing dengan produk impor.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI Erwin Taufan mengemukakan, jika langkah atau rencana yang bakal ditempuh Pemerintah itu tidak melalui kajian atau strategi pendukung yang matang, justru berisiko menggulung sektor industri nasional termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri. Buntutnya, konsumsi didalam negeri akan sangat tergantung terhadap barang asing atau impor.

"Kami bukan tak setuju dengan rencana Pemerintah itu. Tetapi apakah sudah melalu kajian yang matang. Sebagai importir (GINSI) juga selama ini memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan tetap memerhatikan kelangsungan industri nasional. Tetapi kalau semua kran impor dibuka tanpa perlu Pertek, maka potensi banjir produk impor di dalam negeri dan bisa pertanda kiamat bagi produk lokal," ujar Taufan melalui keterangan resminya pada Kamis (10/4/2025).

Dia memaparkan, selama ini GINSI selalu siap mensupport kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik demi kepentingan perekonomian nasionak.

"Kita support perubahan untuk yang baik, tetapi harus diperhatikan juga kelangsungan

industri dalam negeri.Paling tidak, yang menyangkut kebutuhan industri (buat bahan baku) mesti mendapatkan sesuai dengan jumlah kebutuhan produksinya. Tetapi bagi importasi yang hanya bersifat trading tetap harus ada aturan mainnya, gak bisa dilepas kepasar begitu saja," ucap Taufan.

Namun dia mengingatkan terhadap kategori importasi yang dulakukan oleh produsen (pabrik) yang selama itu benar-benar untuk kebutuhan produksinya oreintasi ekspor dan support kebutuhan konsusmi nasional idealnya tidak perlu dibatasi (kuota)-nya, karena jika kouta yang diperlukan namun realisasinya jauh dari kebutuhannya justru menghambat aktivitas industri tersebut.

"Kasihan kalangan industri atau pabrik yang sudah investasi tidak sedikit di dalam negeri yang selama ini benar-benar butuh importasi apalagi jika itu bahan baku. Sebagai contoh, Krakatau Steel, terus bagaimana dia mau support kebutuahan di dalam negeri," ungkap Taufan.

Sebelumnya Presiden Prabowo, dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) meminta agar para Menterinya seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, untuk meniadakan aturan menyangkut kuota impor.

"Enggak ada kuota-kuota itu. Enak saja (khusus kuota untuk beberapa perusahaan). Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi. Siapa mau impor daging, silakan! Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan! Buka saja (keran impor). Rakyat kita pandai kok," tegas Prabowo.

Cost Logistik Meroket Akibat Macet Horor di Priok, Ini Tuntutan Pengusaha Truk

Macet Horor kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya selama dua hari pada Rabu Malam s/d Kamis Malam (16-17 April.2025) dipicu lonjakan bongkar muat petikemas di New Priok Container Terminal One (NPCT-1)

Bahkan berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menunjukan peningkatan hampir 100% jumlah truk yang masuk kedalam terminal itu. Jika rata-rata jumlah armada truk yang masuk kurang dari 2.500 truk setiap harinya, namun pada Kamis kemarin mencapai lebih dari 4.000 truk yang menuju NPCT 1

Kondisi ini menyebabkan NPCT-1 tak lagi mampu menampung kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang atau receiving dan delivery (R/D) sehingga banyak truk mengantre untuk masuk hingga keluar area pelabuhan dan mengalami kemacetan berjam-jam di jalan raya sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Begitupun truk yang hendak keluar terminal itu tidak bisa lancar lantaran kondisi kemacetan diluar pelabuhan sudah parah

Situasi macet horor ini bukan cuma dikeluhkan para pelaku bisnis logistik maupun para pekerja yang setiap hari mengais rezeki di kawasan pelabuhan Tanjung Priok namun juga mendapat sorotan masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan tersibuk di Indonesia itu

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, pelayanan di NPCT-1 perlu di evaluasi menyeluruh termasuk soal keberadaan area common gate-nya yang posisinya terlalu dekat dengan akses jalan raya umum

“Sebaiknya area common gate NPCT-1 itu ditiadakan saja. Kenapa harus ada dua gate untuk masuk ke dalam terminal NPCT-1 ? Ini sangat tidak efektif,” ujar Gemilang pada kamis malam (17/4/2025)

Kemudian, imbuh Gemilang, jika kapasitas layanan bongkar muat di NPCT-1 sudah berlebih atau over capacity, kenapa tidak dilakukan diskresi pengalihan bongkar muat ke terminal lainnya yang ada di pelabuhan Tanjung Priok

"Ketimbang dipaksakan (over capacity) harus di bongkar muat di NPCT-1, kenapa gak dialihkan saja ke terminal lainnya ?." tanya Gemilang

Dia mengatakan, Aptrindo juga sedang mengkalkulasi berapa besar potensi kerugian akibat macet horor di kawasan Tanjung Priok selama dua hari berturut-turut itu

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, NPCT-1, Term

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri mengungkapkan, kondisi kemacetan tersebut terjadi karena adanya peningkatan arus barang dan petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving dan delivery (R/D) di Pelabuhan Tanjung Priok

Hal ini juga bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan paska pembatasan lalu lintas barang

Kendati begitu, dia memaspastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok, dan dipastikan bahwa Kegiatan Bongkar Muat kapal berjalan lancar

Atas kondisi tersebut, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan paska pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada hari Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4)

Adi Sugiri menegaskan pihaknya akan terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistic

"Kami juga tidak akan berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok," ucap Adi Sugiri

Untuk itu, Eksekutif General Manager Regional 2 Tanjung Priok bersama- sama dengan dengan Kepala Kantor KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Pelabuhan serta Terminal – terminal di lingkungan Pelabuhan melakukan penanganan untuk mengurai kemacetan ini, diantaranya memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang bisa dijadikan kantong parkir dan melakukan pengalihan lalu lintas truk kedalam gate pos 9.

Pelindo juga memberikan minuman dan makanan agar mencegah supir-supir truck mengalami kelelahan, kehausan dan kelaparan

IMPOR INDONESIA NAIK DI MARET 2025, PALING BANYAK SAYUR DAN BUAH-BUAHAN

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Indonesia sepanjang Maret 2025 mencapai USD18,92 miliar. Angka impor ini naik 0,38% dibandingkan Februari 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor migas senilai USD3,13 miliar atau naik 9,07% secara bulanan. Sementara itu impor nonmigas senilai USD15,79 miliar mengalami penurunan 1,18% secara bulanan.

"Peningkatan nilai impor secara bulanan ini didorong oleh kenaikan nilai impor migas yang memberikan andil sebesar 1,38%," ujar Amalia dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (21/4/2025).

Secara tahunan, nilai impor Maret 2025 meningkat 5,34%. Nilai impor non migas naik 7,91%, sementara migas turun 5,98% secara tahunan (yoy).

"Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor nonmigas yang andil kenaikannya terhadap total impor sebesar 6,45%," ungkap Amalia.

Berdasarkan data BPS, peningkatan nilai impor secara bulanan utamanya didorong oleh impor barang konsumsi dan barang modal.

Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi naik 18,73% dan terjadi pada bahan sayuran dan buah-buahan, seperti bawang putih naik USD4,6 juta, apel naik USD32,8 juta.

Sementara itu, bahan baku penolong yang menyumbang setidaknya 71,23% dari total impor Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 3,26%.

Di sisi lain, barang modal mengalami peningkatan sebesar 7,28% dan secara tahunan nilai impor barang konsumsi turun 5,81%, sementara itu bahan baku penolong naik 2,05% dan barang modal naik 27,36%.

EKSPOR INDONESIA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025 SEBESAR 66,62 MILIAR DOLAR AS

Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada triwulan I tahun 2025 nilai ekspor Indonesia mencapai 66,62 miliar dolar AS atau naik 6,93 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

" Secara kumulatif Januari-Maret 2025 nilai ekspor Indonesia mencapai 66,62 miliar dolar AS atau naik 6,93 persen dibanding periode yang sama tahun 2024," kata- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta, Senin (21/4).

Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai 62,98 miliar dolar AS juga naik 7,84 persen.

Sementara nilai ekspor Indonesia Maret 2025 mencapai 23,25 miliar dolar AS atau naik 5,95 persen dibanding ekspor Februari 2025. Dibanding Maret 2024, nilai ekspor naik sebesar 3,16 persen. Ekspor nonmigas Maret 2025 mencapai 21,80 miliar dolar AS naik 4,71 persen dibanding Februari 2025 dan naik 2,56 persen jika dibanding ekspor nonmigas Maret 2024.

Dikatakan, dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar Maret 2025, komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah bijih logam, terak, dan abu sebesar 573,6 juta dolar AS (4.154,80 persen).

Sementara yang mengalami penurunan terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya sebesar 147,1 juta dolar AS (20,58 persen).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Maret 2025 naik 16,75 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 43,09 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 29,50 persen.

Ekspor nonmigas Maret 2025 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 5,20 miliar dolar AS , disusul Amerika Serikat 2,63 miliar dolar AS dan India 1,41

miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,37 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 4,16 miliar dolar AS dan 1,73 miliar dolar AS.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Maret 2025 berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan nilai 9,32 miliar dolar AS (13,99 persen), diikuti Jawa Timur 6,15 miliar dolar AS (9,22 persen) dan Kepulauan Riau 5,82 miliar dolar AS (8,74 persen).

Sedangkan nilai impor Indonesia Maret 2025 mencapai 18,92 miliar dolar AS , naik 0,38 persen dibandingkan Februari 2025 dan naik 5,34 persen dibandingkan Maret 2024.

Impor migas Maret 2025 senilai 3,13 miliar dolar AS, naik 9,07 persen dibandingkan Februari 2025, namun turun 5,98 persen dibandingkan Maret 2024.

Impor nonmigas Maret 2025 senilai 15,79 miliar dolar AS turun 1,18 persen dibandingkan Februari 2025, namun naik 7,91 persen dibandingkan Maret 2024.

Dari sepuluh golongan barang utama nonmigas Maret 2025, golongan mesin/ peralatan mekanis dan bagiannya mengalami peningkatan tertinggi senilai 0,21 miliar dolar AS (8,66 persen) dibandingkan Februari 2025. Sementara golongan bahan bakar mineral mengalami penurunan terbesar senilai 0,14 miliar dolar AS (29,62 persen).

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Maret 2025 adalah Tiongkok 6,31 miliar dolar AS (39,96 persen), Jepang 1,22 miliar dolar AS (7,75 persen), dan Thailand 0,71 miliar dolar AS (4,50 persen). Impor nonmigas dari ASEAN 2,55 miliar dolar AS (16,15 persen) dan Uni Eropa 0,92 miliar dolar AS (5,82 persen).

Nilai impor golongan bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari– Maret 2025 mengalami peningkatan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing senilai 0,41 miliar dolar AS (1,03 persen) dan 1,03 miliar dolar AS (10,87 persen). Sementara golongan barang konsumsi turun 0,63 miliar dolar AS (11,48 persen).

Sementara neraca perdagangan Indonesia Maret 2025 mengalami surplus 4,33 miliar dolar AS yang berasal dari surplus sektor nonmigas 6,00 miliar dolar AS sementara sektor migas defisit senilai 1,67 miliar dolar AS.

HATI-HATI, SEMBILAN PANGAN OLAHAN IMPOR INI MENGANDUNG UNSUR BABI

(Jakarta)- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan sebanyak sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, tapi tidak dicantumkan dalam kemasan.

"Terdapat sembilan batch produk yang terdiri dari tujuh produk yang sudah bersertifikat halal dan dua batch produk dari dua produk yang tidak bersertifikat halal," ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sembilan produk pangan olahan itu meliputi tujuh produk bersertifikat halal, yaitu Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur) yang diproduksi oleh Sucere Foods Corporation, Philippines dan diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses.

Kedua, Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow) yang juga diproduksi oleh Sucere Foods Corporation, Philippines dan diimpor PT Dinamik Multi Sukses.

Produk ketiga, ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil) yang diproduksi Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China dan diimpor PT Catur Global Sukses.

Berikutnya, produk keempat adalah ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga) yang juga diproduksi Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China dan diimpor PT Catur Global Sukses.

Produk kelima dengan produsen dan pengimpor yang sama, yakni ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow).

Selanjutnya, ada pula produk pangan olahan yaitu Hakiki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel) yang diproduksi PT Hakiki Donarta dan Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling) yang diproduksi oleh Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial.

Kemudian, terdapat dua produk lainnya yang belum tersertifikasi halal, yakni China; AAA Marshmallow Rasa Jeruk yang diproduksi Chaozhou Chaoan District Yongye Foods Co., Ltd dan diimpor oleh PT Aneka Anugrah Abadi; serta SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat yang diproduksi oleh Fujian Jianmin Food Co., Ltd., China dan diimpor oleh Brother Food Indonesia.

Haikal lalu menyampaikan tujuh produk yang telah bersertifikat dan berlabel halal itu telah diberikan sanksi oleh BPJPH berupa penarikan barang dari peredaran, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sementara dua produk lainnya yang terindikasi tidak memberikan data yang benar dalam registrasi produk, BPOM telah menerbitkan sanksi berupa peringatan dan menginstruksikan pelaku usaha untuk segera menarik produk dari peredaran, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

PERLUAS PELUANG EKSPOR, BEA CUKAI BERI IZIN KAWASAN BERIKAT KE PRODUSEN TAS DI JEPARA

Semarang, 22-04-2025 - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jateng DIY beri izin fasilitas kawasan berikat ke PT TBS Industrial Indo, produsen tas dan dompet kulit, pada Rabu (16/04). Fasilitas tersebut akan membuka peluang untuk perusahaan mengekspor produknya ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Jepang, Korea, dan Singapura.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto menyatakan bahwa fasilitas kawasan berikat bukan hanya sekadar izin, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional. “Fasilitas ini memberikan ruang bagi PT TBS Industrial Indo untuk terus berkembang, meningkatkan ekspor, dan tentunya membuka lapangan kerja di Jepara. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung perusahaan yang memiliki orientasi ekspor,” ujarnya.

Dengan nilai investasi mencapai Rp94,5 miliar pada tahun 2025, PT TBS Industrial Indo berencana untuk menghasilkan nilai ekspor yang signifikan. Pada tahun yang sama, perusahaan menargetkan nilai ekspor mencapai Rp205,3 miliar dan diperkirakan akan naik menjadi Rp273,7 miliar pada tahun 2029. Lebih dari itu, sebagai dampak sosial, perusahaan diperkirakan akan menyerap 700 karyawan pada 2025. Jumlah ini pun akan meningkat menjadi 1.000 karyawan dalam empat tahun ke depan.

"Kehadiran fasilitas kawasan berikat ini juga diyakini akan memberi dampak ekonomi positif yang lebih luas. Dari usaha warung makan yang tumbuh di sekitar pabrik hingga kos-kosan dan jasa transportasi, keberadaan PT TBS Industrial Indo akan memberi napas baru bagi ekonomi lokal," lanjut Megah.

Di lain pihak, Direktur PT TBS Industrial Indo, Nguyen Quang Minh Nhat menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Bea Cukai. “Pelayanan yang kami terima sangat memadai dan memberikan keyakinan bagi kami untuk terus berkembang dan mengembangkan pasar ekspor kami,” katanya.

Dengan adanya fasilitas kawasan berikat ini, PT TBS Industrial Indo berharap dapat semakin mengukir prestasi di dunia ekspor dan menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global. Fasilitasi kawasan berikat menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kolaborasi, dan dukungan dari berbagai pihak dapat menghasilkan buah yang manis.

BPS CATAT NILAI EKSPOR JATENG PER MARET TEMBUS 1.010,70 JUTA DOLAR AS

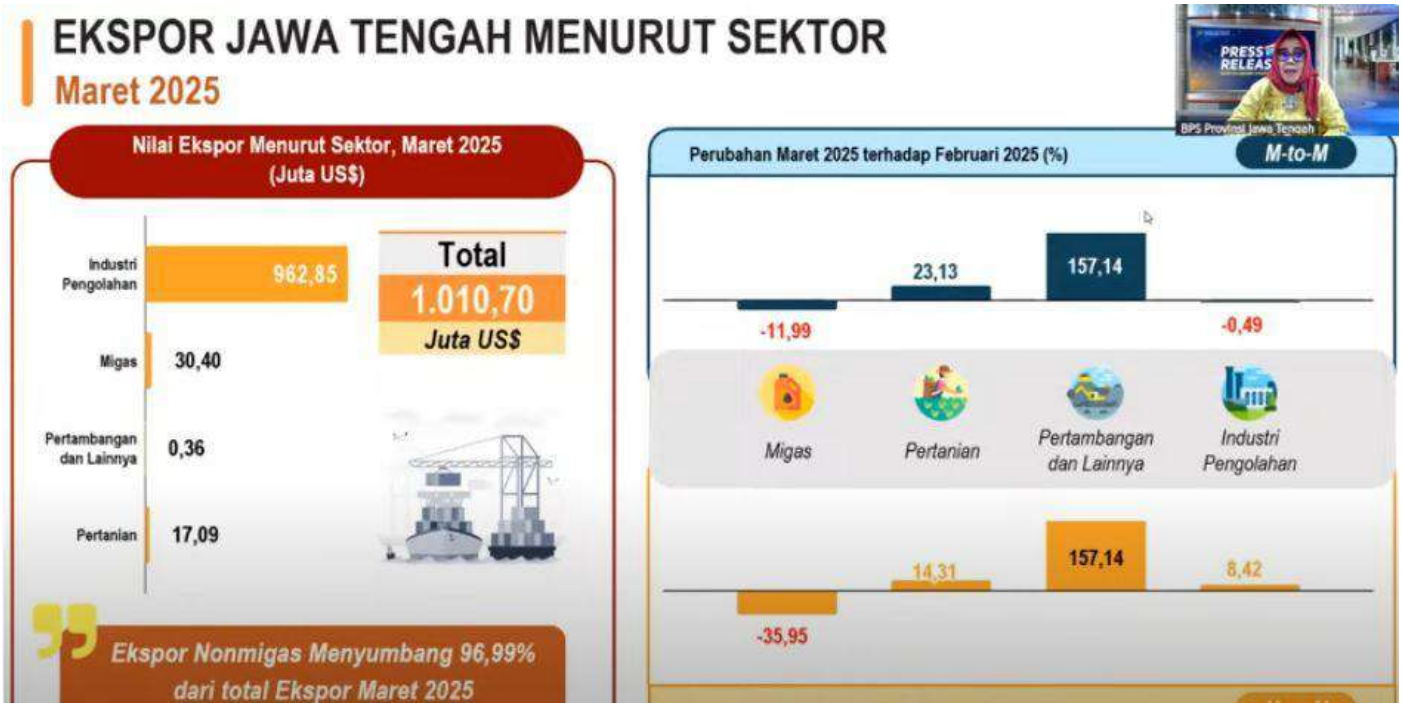

SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat nilai ekspor Jawa Tengah periode Maret 2025 sebesar 1.010,70 juta dolar AS.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan, angka itu turun 0,54 persen dibandingkan periode Februari 2025.

Dia menambahkan untuk nilai ekspor migas tercatat 30,40 juta dolar AS atau turun 11,99 persen. Kendati begitu, nilai ekspor nonmigas naik 0,14 persen, atau dengan nilai 980,30 juta dolar AS

"Ekspor Jawa Tengah menurut sektor, untuk ekspor nonmigas menyumbang 96,99 persen dari total ekspor Maret 2025. Kita lihat ekspor menurut sektor, industri pengolahan masih dalam posisi tertinggi sebesar 962,85 juta dolar AS," terang Endang dalam siaran langsung di kanal resmi BPS Jateng, Senin (21/4/2025).

Selanjutnya, sektor migas 30,40 juta dolar AS, pertambangan dan lainnya 0,36 juta dolar AS, dan pertanian 17,09 juta dolar AS. Dia menuturkan untuk pangsa ekspor nonmigas Jateng pada Maret 2025, BPS mencatat, Amerika Serikat masih mendominasi yaitu 46,70 persen atau senilai 457,84 dolar AS.

"Jadi bersiap bapak/ibu semua, terkait kebijakan Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump) yang nanti akan diterapkan pada bulan April 2025, dan akan terlihat di rilis kita pada bulan Mei 2025 seperti apa," tuturnya.

Endang menambahkan, ada sepuluh barang HS (Harmonized System) dua digit, dengan peningkatan dan penurunan ekspor terbesar pada Maret 2025. HS disusun, disepakati, dan dipakai oleh hampir semua negara, dalam menentukan klasifikasi barang perdagangan dunia.

Sepuluh barang itu yaitu lima mengalami kenaikan cukup tinggi ada kode HS 64 alas kaki dengan kenaikannya 27,45 juta dolar AS, disusul kode HS 38 berbagai produk kimia sebesar 8,59 juta dolar AS, kode HS 03 ikan, krustasea dan moluska 7,46 juta dolar AS, kode HS 95 mainan, permainan dan keperluan olahraga serta kode HS 09 kopi, teh, dan rempah-rempah 2,74 juta dolar AS

Lima kode HS lainnya mengalami penurunan, yakni kode HS 62 pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) 33,55 juta dolar AS, disusul kode HS 94 perabotan lampu 6,17 juta dolar AS, kode HS 44 kayu dan barang dari kayu 5,28 persen; HS 70 kaca dan barang dari kaca 3,42 juta dolar AS, dan kode HS 24 tembakau dan rokok 2,87 juta dolar AS.

Selanjutnya, nilai impor Jateng pada Maret 2025 mencapai 1.059,39 juta dolar AS, atau turun 10,92 persen dibandingkan Februari 2025. Penurunan itu karena sektor migas 17,87 persen dan nonmigas 4,52 persen.

Secara tahunan nilai ekspor Maret 2025, mengalami peningkatan sebesar 6,32 persen. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas 8,54 persen. Sebaliknya untuk sektor migas mengalami penurunan 35,95 persen atau senilai 30,40 juta dolar AS.

Endang menambahkan, untuk neraca perdagangan Jawa Tengah pada Maret 2025 secara total defisit 48,69 juta dolar AS

“Kita defisit tipis, ya, 48,69 juta dolar AS,” terangnya.

IMBAS TARIF TRUMP, PEMPROV JATENG MINTA EKSPORTIR MULAI CARI PASAR BARU

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dipastikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah.

Pemprov Jateng pun meminta eksportir mulai melakukan diservikasi dan ekspansi ke negara-negara di Eropa sebagai tujuan ekspor.

Diketahui, Presiden Amerika Serika Donald Trump menerapkan tarif resiprokal 32 persen untuk barang impor Indonesia.

Hal ini akan membuat barang dari Indonesia bakal kalah saing dengan negara lain.

Hanya saja, hingga kini, dampak tersebut belum dirasakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, Pemprov Jateng telah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha untuk menghadapi situasi ini.

"Waktu itu disampaikan beberapa pelaku usaha yang kami undang bahwa memang belum berdampak karena terinfo bahwa yang sudah siap untuk ekspor, (tetap) ekspor."

"Tetapi, dalam perjalanannya, tarif itu turun dari 32 persen menjadi 10 persen. Jadi, otomatis semua proses ekspor, baik alas kaki, garmen, produk pakaian jadi rajut dan bukan rajut yang tujuannya tertinggi ke Amerika Serikat masih tetap jalan," kata Sakina, Senin (21/4/2025).

Menurut Sakina, 41 persen dari total ekspor Jawa Tengah pada 2024 adalah tujuan Amerika Serikat.

Barang-barang yang dijual ke negeri Paman Sam tersebut berupa alas kaki, garmen, pakaian jadi rajut, dan nonrajut.

Selain terdampak tarif resiprokal AS, Jawa Tengah juga dikhawatirkan menerima dampak perang dagang AS-China.

Padahal, Jawa Tengah memiliki ketergantungan terhadap impor dari Tiongkok, terutama peralatan mesin yang digunakan dalam investasi.

Sementara itu, impor dari AS didominasi sereal dan gandum.

Dengan kondisi ini, Sakina menekankan pentingnya diversifikasi dalam perdagangan.

"Kami berharap, kalau namanya ekspor impor, tidak ada yang dominasi. Harusnya, ekspor itu menyebar ke berbagai negara. Impor juga."

"Kebijakan pusat juga sama. Ekspor tidak hanya pada satu negara tetapi mulai menyebar ke berbagai negara, termasuk Eropa, sasarannya," terangnya.

Sakina pun berharap, para pengusaha menemukan pasar baru di luar AS meski hal tersebut bukan hal mudah

"Pelaku usaha biasanya mendapatkan pesanan berdasarkan order dan order tersebut sudah menetapkan tujuan negara tertentu."

"Misalnya, alas kaki dan garmen, ternyata juga pada negara tertentu, termasuk Amerika."

"Kami mulai mengimbau (pengusaha) untuk tidak ada dominasi ekspor atau impor," jelasnya.

Sementara itu, dia menekankan nilai neraca perdagangan Jawa Tengah sektor nonmigas hingga saat ini masih surplus.

"Jawa Tengah masih surplus. Artinya, ekspornya lebih tinggi daripada impor," imbuhnya.

REGULASI IMPOR HARUS DIJALANKAN SELEKTIF, JANGAN LEMAHKAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menyoroti perkembangan situasi ekonomi global yang tengah berlangsung. Ia menegaskan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan ekonomi secara terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

"Kita menginginkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional. Ini penting agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga," ujar Kholid di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Kholid adalah kebijakan impor. Ia menegaskan bahwa regulasi impor harus dijalankan secara selektif agar tidak melemahkan industri dalam negeri.

"Tidak semua sektor harus dibuka untuk impor. Kita harus selektif, terutama dalam memilih sektor-sektor yang justru bisa mendukung dan mendorong kinerja industri ekspor nasional. Jadi impor boleh, tapi harus yang mendukung penguatan industri ekspor kita," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

GENJOT PERPAJAKAN

Lebih lanjut, Kholid juga menekankan pentingnya peningkatan penerimaan perpajakan secara signifikan. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang lebih ekspansif ke depan.

"Dengan tantangan pembangunan ke depan yang semakin besar, kita membutuhkan dorongan fiskal yang kuat. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan harus terus ditingkatkan secara signifikan," tutupnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Muhammad Kholid dalam mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga berpihak pada penguatan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa.

Diketahui, Pemerintah Indonesia menawarkan untuk menaikkan impor dari Amerika Serikat demi menurunkan tarif yang dikenakan Presiden AS Donald Trump pada produk-produk Indonesia. Impor LPG, minyak mentah, dan bahan bakar minyak akan dinaikkan supaya neraca perdagangan dengan AS seimbang.

"Impor tambahan dari AS dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

Bahlil menuturkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus Indonesia atas AS sekitar 14,5 miliar dollar AS. "Tapi kemudian dalam pencatatan di Amerika, kan, berbeda. Itu lebih dari 14,5 (miliar dollar AS)," ujarnya.

Surplus perdagangan Indonesia, menurut Pemerintah AS, mencapai 18,5 miliar dollar AS. Oleh karena itu, produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS dikenai tarif 32 persen.

"Salah satu strategi untuk kita membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude (oil), dan BBM dari Amerika. Nilainya untuk bisa memberikan keseimbangan terhadap neraca perdagangan kita," kata Bahlil.

Tawaran kenaikan kuota impor dari AS, menurut Bahlil, tidak akan menaikkan kuota impor Indonesia secara keseluruhan. Sebab, ini hanya akan mengalihkan impor dari negara lain ke AS.

"Sebenarnya ini, kan, adalah sebagian kita beli dari negara-negara di middle east, di Afrika, kemudian di Asia Tenggara, ini kita switch aja, kita pindah aja ke Amerika, dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita," ujarnya.

Namun, lanjut Bahlil, apabila tarif Trump tak bisa dinegosiasikan, langkah menaikkan impor komoditas AS ini tak perlu dilakukan

RI MASIH IMPOR BATU NISAN DARI CHINA, TAHUN LALU NILAINYA MELONJAK SEGINI

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu eksportir batu nisan terbesar ke negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, rupanya masih mengimpor batu nisan dari luar negeri, khususnya dari China.

Lantas, mengapa RI masih tergantung pada impor?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya melihat nilai histori impor batu nisan RI dalam beberapa tahun terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor batu nisan dengan kode HS 68029900 sempat mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, sebelum akhirnya melonjak pada 2024.

Pada tahun 2019, nilai impor tercatat sebesar USD1,93 juta dan naik menjadi USD2,35 juta di tahun 2020.

Namun, sejak 2021, tren impor mulai turun, bahkan mencapai titik terendah sebesar USD948 ribu pada 2022.

Akan tetapi, pada 2024 impor kembali naik menjadi USD1,59 juta atau sekitar Rp26,74 miliar (dengan kurs USD1 = Rp16.820), menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap batu nisan dari luar negeri.

a. 2019: USD1,93 juta
b. 2020: USD2,35 juta
c. 2021: Turun
d. 2022: Titik terendah, hanya USD948 ribu
e. 2024: Naik kembali menjadi USD1,59 juta (sekitar Rp26,74 miliar)

China Dominasi Pasar Impor Batu Nisan RI

Berdasarkan data yang sama, China menjadi pemasok terbesar batu nisan ke Indonesia dengan nilai mencapai USD747 ribu, disusul Hong Kong (USD582 ribu), India dan Brasil dengan kontribusi lebih kecil.

Dominasi China dalam pasar impor ini bukan hal yang mengejutkan, mengingat Negeri Tirai Bambu tersebut dikenal memiliki industri batu alam yang besar serta mampu menawarkan harga yang kompetitif.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk industri batu nisan–seperti marmer, granit dan batu pasir–rupanya ada beberapa alasan mengapa impor masih dilakukan.

1. **Spesifikasi dan Kualitas Batu Berbeda**

Batu nisan impor, khususnya dari China dan Hong Kong, memiliki karakteristik berbeda dari produk lokal: teksturnya lebih keras dan padat, tahan cuaca, serta tampilannya lebih elegan dan modern.

Sebagian besar batu nisan dari China terbuat dari granit hitam pekat yang dikenal sebagai “Black Nero”.

Sebaliknya, batu lokal cenderung lebih beragam warnanya seperti abu-abu, merah muda, atau bergaya *rustic* dari batu pasir—jenis yang belum tentu disukai semua konsumen.

2. **Harga dan Efisiensi Produk**

Harga batu nisan impor umumnya lebih murah karena efisiensi produksi yang tinggi di negara asal.

Bagi sejumlah importir atau pengrajin lokal, membeli batu nisan dari China bisa menjadi pilihan ekonomis, terutama jika membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar dengan harga kompetitif.

TRUMP UMUMKAN TARIF IMPOR OTOMOTIF 25%, BERLAKU MULAI 2 APRIL 2025

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani perintah untuk menerapkan tarif 25% pada impor mobil. Kebijakan ini pun dinilai semakin memperluas perang dagang. Melansir Bloomberg pada Kamis (27/3/2025), kebijakan tersebut dirancang untuk mendatangkan lebih banyak pekerjaan manufaktur ke AS. Trump menuturkan, tarif tersebut berlaku pada semua mobil yang tidak dibuat di Amerika Serikat.

"Kami akan mengenakan tarif kepada negara-negara yang melakukan bisnis di negara kami dan mengambil pekerjaan kami, mengambil kekayaan kami, mengambil banyak hal yang telah mereka ambil selama bertahun-tahun," kata Trump di Gedung Putih.

Presiden mengatakan tarif akan mulai berlaku pada tanggal 2 April 2025 dan AS akan mulai mengenakannya sehari kemudian. Gedung Putih mengatakan tarif akan berlaku tidak hanya untuk mobil yang sudah dirakit sepenuhnya tetapi juga suku cadang mobil utama, termasuk mesin, transmisi, suku cadang mesin penggerak, dan komponen listrik.

Daftar tersebut dapat diperluas dari waktu ke waktu untuk mencakup suku cadang tambahan. Trump menyatakan tarif tersebut permanen dan dia tidak tertarik untuk menegosiasikan pengecualian apa pun. Saham General Motors Co., Ford Motor Co., dan Stellantis NV turun dalam perdagangan setelah jam kerja saat Trump berbicara.

Gedung Putih dalam lembar fakta mengatakan importir yang kendaraannya tercakup dalam perjanjian dagang United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), akan diberi kesempatan untuk mensertifikasi konten AS mereka dan sistem akan diterapkan sedemikian rupa sehingga tarif 25% hanya akan berlaku untuk nilai konten non-AS mereka. Sekretaris Staf Gedung Putih Will Scharf mengatakan, tarif tersebut akan berlaku bersama dengan pungutan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pemerintah ASmemproyeksikan bahwa tarif akan menghasilkan pendapatan tahunan baru sebesar US$100 miliar bagi AS.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang membahas tarif dengan syarat anonim, mengatakan

pemerintah akan mengembangkan rencana untuk menangani suku cadang yang melintasi perbatasan beberapa kali.

Langkah tersebut dilakukan menjelang pengumuman tarif timbal balik Trump yang ditargetkan pada 2 April — upaya untuk menurunkan hambatan negara lain dan mengecilkan defisit perdagangan AS. Tarif tersebut akan membuat AS menerapkan tarif berdasarkan negara per negara untuk melawan hambatan yang dikenakan pada impor Amerika. Namun, Trump telah mengisyaratkan beberapa mitra dagang mungkin menerima kemungkinan pengecualian atau pengurangan bea.

Tarif khusus industri lainnya juga sedang disusun, dengan Trump mengancam akan mengenakan pungutan pada kayu, semikonduktor, dan obat-obatan farmasi. "Itulah Hari Pembebasan Amerika yang sesungguhnya, dan itu akan terjadi pada tanggal 2 April, dan saya menantikannya," kata Trump pada hari Rabu.

Pungutan otomotif menandai perluasan signifikan dari perang dagang presiden, dan kemungkinan akan menjerat beberapa merek otomotif terbesar di negara-negara termasuk Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, yang semuanya merupakan mitra dagang utama AS.

Langkah tersebut berisiko mengganggu operasi bagi para produsen mobil Amerika Utara, yang bergantung pada rantai yang sangat terintegrasi di seluruh AS, Meksiko, dan Kanada. Namun, tarif akan memengaruhi konten non-AS di beberapa model Detroit yang paling dikenal dan menguntungkan.

GM mengimpor beberapa truk pikap Chevrolet Silverado dari pabrik di Meksiko dan Kanada, sementara Stellantis membuat model termasuk SUV Jeep Compass di Meksiko.

Ford memproduksi pangsa pasar domestik AS yang lebih besar daripada pesaingnya di Detroit, tetapi tidak akan luput dari dampaknya. Ford juga memproduksi truk pikap kecil Maverick tingkat pemula di Meksiko serta SUV Bronco Sport.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan keputusan AS itu disesalkan. "Kami sekarang akan menilai pengumuman ini, bersama dengan langkah-langkah lain yang direncanakan AS dalam beberapa hari ke depan. UE akan terus mencari solusi yang dinegosiasikan, sambil menjaga kepentingan ekonominya," kata von der Leyen dalam sebuah pernyataan. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan tarif AS merupakan serangan langsung terhadap orang-orang yang bekerja di industri otomotif dan melanggar perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada.

Dia tidak mengungkapkan tindakan pembalasan baru dan mengatakan pihaknya akan terbang kembali ke Ottawa untuk bertemu dengan anggota kabinetnya terlebih dahulu.

Perdana Menteri Ontario Doug Ford, pemimpin provinsi yang menjadi rumah bagi sebagian besar industri otomotif Kanada, mengatakan hampir dapat dipastikan bahwa Kanada akan membalas. Dia mendesak Carney untuk menargetkan mobil-mobil Amerika atau kendaraan buatan AS memiliki pangsa pasar kendaraan Kanada yang dominan.

"Kami akan memastikan bahwa kami menimbulkan penderitaan sebanyak mungkin bagi rakyat Amerika tanpa menimbulkan penderitaan bagi penduduk Kanada," kata perdana menteri tersebut. Autos Drive America, yang melobi produsen mobil yang berkantor pusat di luar AS, termasuk Toyota Motor Corp. dan BMW AG, memperingatkan bahwa pungutan baru tersebut akan berdampak sebaliknya dari apa yang diinginkan Trump.

“Tarif yang diberlakukan hari ini akan membuat produksi dan penjualan mobil di Amerika Serikat menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya akan menyebabkan harga yang lebih tinggi, lebih sedikit pilihan bagi konsumen, dan lebih sedikit lapangan pekerjaan manufaktur di AS,” kata Jennifer Safavian, presiden kelompok tersebut, dalam sebuah pernyataan.

Namun, Trump berpendapat tarif akan membantu memacu pertumbuhan di sektor otomotif domestik dan memaksa perusahaan untuk memindahkan lebih banyak produksi ke AS.

"Sebelum saya terpilih, kami kehilangan semua pabrik yang dibangun di Meksiko dan Kanada serta tempat-tempat lain. Sekarang sebagian besar pabrik tersebut telah berhenti dan mereka memindahkannya ke negara kami," katanya.

Sementara itu, Presiden Serikat Pekerja Otomotif AS, Shawn Fain memuji langkah tersebut dalam sebuah pernyataan. "Mengakhiri persaingan menuju kehancuran dalam industri otomotif dimulai dengan memperbaiki kesepakatan perdagangan yang rusak, dan pemerintahan Trump telah membuat sejarah dengan tindakan hari ini," kata Fain.

Saat menjawab pertanyaan tentang kemungkinan kenaikan yang akan dihadapi pembeli mobil Trump mengulangi janjinya untuk mencari pengurangan pajak atas pinjaman mobil.

Dia meminta Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson, yang menghadiri penandatanganan, untuk memasukkannya dalam paket pemotongan pajak mendatang yang sedang dinegosiasikan di Kongres.

"Kami berusaha mendapatkan persetujuan, jika kami bisa," kata Trump. "Jika Anda meminjam uang untuk membeli mobil, Anda diizinkan untuk mengurangi pembayaran bunga untuk tujuan pajak penghasilan, tetapi hanya jika mobil tersebut dibuat di Amerika."

Tindakan Trump siap membuat mobil lebih mahal bagi konsumen AS yang sudah tidak nyaman dengan inflasi dan memperkuat kekhawatiran bahwa tarifnya akan membuat ekonomi merosot.

Tarif kemungkinan akan menaikkan harga mobil buatan luar negeri, tetapi bahkan kendaraan buatan AS akan mengalami kenaikan harga jika pasokan dan suku cadang terkena pungutan atau jika rantai pasokan terputus dari manufaktur di negara-negara berbiaya rendah.

Impor mobil dan truk ringan AS tahun lalu bernilai lebih dari $240 miliar. Analis memperkirakan bahwa tarif baru dapat meningkatkan harga mobil baru hingga ribuan dolar per kendaraan. Satu studi baru-baru ini menemukan bahwa tarif pada Kanada, Meksiko, dan China akan menaikkan biaya produksi kendaraan crossover sekitar $4.000, sementara EV buatan AS akan melonjak sekitar $12.000.

Trump bertaruh bahwa langkah tarifnya akan mengubah industri AS dan mengklaim pendekatannya sudah berhasil. Minggu ini, dia menjamu para eksekutif dari Hyundai Motor Co. di Gedung Putih dan memuji rencana ekspansi AS senilai US$21 miliar dari produsen mobil Korea Selatan itu sebagai peragaan jelas bahwa tarif sangat efektif.

Namun, penerapan bea masuk perdagangan oleh Trump tidak menentu, ditandai dengan penundaan dan penangguhan saat dia mendapatkan konsesi kebijakan dari mitra dagang. Perubahan tersebut telah mengguncang pasar dan membuat para pemimpin bisnis merasa tidak nyaman saat mereka menghadapi keputusan investasi dan perekrutan. Trump memberlakukan tarif 25% pada impor dari Meksiko dan Kanada pada awal Maret tetapi menundanya selama sebulan pada barang-barang — termasuk mobil dan suku cadang — yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara USMCA.

KURANGI IMPOR, PEMERINTAH TARGETKAN 2 FASILITAS LPG BARU BEROPERASI PADA AKHIR 2025

Pemerintah menargetkan dua fasilitas pengolahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau LPG plant tambahan dapat mulai beroperasi pada akhir 2025. Kedua proyek tersebut akan dikembangkan di Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang dan Offshore North West Java (ONWJ).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, proyek tersebut akan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku operator WK Jambi Merang dan ONWJ.

"Pak Menteri sudah menandatangani alokasi dan harga gasnya. Tujuh bulan dari sekarang insya Allah bisa onstream juga LPG plant nya, itu akan menambah produksi LPG dalam negara juga," kata Djoko saat ditemui Kontan di Jambi, Kamis (17/4).

Djoko menambahkan, fasilitas LPG di Jambi Merang dirancang memiliki kapasitas produksi hingga 200 metrik ton per hari. Sementara itu, LPG plant di ONWJ yang berlokasi di lepas pantai Jawa Barat akan memiliki kapasitas sekitar 180 metrik ton per hari.

"LPG dari Jambi Merang, lapangan gas Jambi Merang nanti produksinya bisa 200 metric ton per hari. Sebelum itu juga nanti ada di ONWJ di Jawa Barat, juga sama kapasitasnya sekitar 180 metric," ungkapnya.

Pembangunan dua unit pengolahan LPG ini menjadi bagian dari upaya SKK Migas meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi gas nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor LPG.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti berharap proyek fasilitas pengolahan LPG dapat segera diselesaikan sesuai target. Pasalnya, upaya ini untuk meningkatkan produksi energi untuk intensitas konsumsi energi yang besar seperti LPG sangat membantu bagi Indonesia, di tengah tingginya impor LPG.

"Akan tetapi, perlu diperhitungkan agar harga LPG ini harus memenuhi kriteria household untuk meningkatkan Household Affordability dan Accesibility. Selain hal itu produksi LPG ini harus mencerminkan adanya fiscal efficiency dengan substitusi impor," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (20/4).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan lapangan migas yang dapat memproduksi gas elpiji (LPG) untuk mengurangi ketergantungan impor.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini pemerintah tengah memetakan wilayah kerja migas yang berpotensi menghasilkan LPG. Pasalnya, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, sehingga peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas.

“Kalau ada lapangan yang menghasilkan gas seperti di Akatara ini, ya justru sangat berpotensi meningkatkan ketersediaan energi, terutama LPG di dalam negeri,” kata Yuliot usai meresmikan Proyek Akatara di Wilayah Kerja Lemang, Jambi, Rabu (16/4).

Proyek Akatara yang dikelola Jadestone Energy menjadi salah satu contoh lapangan migas yang mampu menghasilkan LPG. Dengan investasi senilai Rp 2 triliun, proyek ini memproduksi gas sebesar 25,7 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), menghasilkan 185 ton LPG dan 1.000 barel kondensat per hari.

“Dan juga plant yang dibangun di sini, ini kan sangat efisien untuk kita mendapatkan LPG dan juga mendapatkan kondensat. Jadi, untuk kondensat yang bisa kita gunakan untuk industri kimia, sementara LPG-nya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Yuliot.

Produksi LPG dari Akatara diperkirakan mencapai 125.000 metric ton per tahun. Jika dikonversikan ke tabung gas ukuran 3 kilogram, produksi tersebut mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan LPG di Provinsi Jambi.

“Kalau ini ada dua proyek seperti ini, berarti kebutuhan LPG Jambi bisa terpenuhi,” tambahnya.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan lapangan-lapangan gas serupa, khususnya di wilayah Jambi yang memiliki kondisi geologi gas yang mirip dengan Lapangan Akatara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK

Menimbang :

a. bahwa Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
c. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk ubin keramik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik, telah berakhir masa berlakunya;
d. bahwa hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah membuktikan industri dalam negeri mengalami ancaman kerugian serius berupa penurunan indikator kinerja industri dalam negeri akibat jumlah impor produk ubin keramik yang mengalami peningkatan dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk ubin keramik;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPORPRODUK UBIN KERAMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk ubin keramik dengan uraian barang ubin dan paving, ubin perapian, dan ubin dinding dari keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat ditutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm (tujuh centimeter) atau lebih, yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 2 (dua) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

a. bea masuk umum (most favoured nation); atau
b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 5

(1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk ubin keramik dari semua negara.
(2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk ubin keramik yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 6

(1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk ubin keramik yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
(3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
   a. kriteria asal barang (origin criteria);
   b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
   c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
(4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
(5) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal importasi produk ubin keramik berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

(2) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan retroactive check, atas importasi produk ubin keramik yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

(1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk ubin keramik yang:
   a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
   b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

(2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Februari 2025
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE APRIL 2025

1. HALAL BI HALAL UNSUR MARITIM DI LINGKUNGAN TANJUNG EMAS

BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri acara Halal Bi Halal Unsur Maritim di Lingkungan Tanjung Emas yang diadakan oleh TPK Semarang pada hari Rabu, 9 April 2025 di Café Pesta Kebon Semarang.

2. RAPAT KOORDINASI DAMPAK TARIF IMPOR AS KE JAWA TENGAH

Menghadiri acara Rapat Koordinasi Dampak Tarif Impor AS ke Jawa Tengah di Kantor Gubernur Lt. 4 pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 13.00 WIB. Pada Rapat ini berdiskusi apa saja dampak yang dialami para pengusaha khususnya di lingkungan Jawa Tengah.

3. RAPAT FASILITASI PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS

Selasa, 15 April 2025 BPD GINSI menghadiri rapat terkait diskusi fasilitas pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lt. 4 Gedung Gubernur Jawa Tengah.

4. RAKERWIL DPW ALFI JAWA TENGAH

Menghadiri acara Rakerwil DPW ALFI Jateng pada hari Selasa, 22 April 2025.

5. SEMINAR PENGUSAHA

Kamis, 24 April 2025 BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri undangan terkait Seminar Pengusaha yang diadakan oleh Muatmuat.id yang berkerjasama dengan Kadin Kota Semarang. Acara ini diadakan di Hotel Pandanaran Lt. 5 Semarang.